

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Polri merupakan alat negara yang sangat berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mottonya yakni pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat. Polri merupakan institusi yang diharapkan dapat menjadi kebanggaan masyarakat. Khususnya dalam penegakkan hukum di Indonesia. Seiring berkembangannya IPTEK dan kemajuan zaman, bentuk segala kriminalitas pun semakin bervariasi, maka Polri semakin dituntut untuk menumpas segala bentuk kriminalitas yang berkembang (Kunarto, 1997, hlm. 21). Tugas utama Polri mengacu pada konsep Tribrata, sedangkan orientasi kerjanya dikawal oleh konsep Caturprasetya. Meneliti dan menulis tentang polisi adalah hal yang sangat menarik minat penulis. Karena seorang polisi memiliki banyak pilihan untuk menempatkan dirinya pada bentangan luas yang begitu dilematis posisinya antara dibenci atau dikagumi. Namun apapun posisi maupun kondisinya, polisi tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimanapun masyarakat membenci, suatu saat rakyat pasti membutuhkan polisi. Polisi merupakan cermin masyarakat. Polisi akan santun jika masyarakatnya santun, polisi tidak bisa santun di tengah masyarakat yang kurang santun.

Dewasa ini mulai marak terjadi krisis ketidakpercayaan terhadap POLRI. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran maupun kasus yang ironisnya dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri khususnya pelanggaran di tubuh POLRI itu sendiri. Pada tahun 2013 contohnya, terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan Kakorlantas POLRI pada saat itu Irjen. Pol. Djoko Susilo. Seperti yang dipaparkan oleh KPK (2013) bahwa:

“Djoko dinyatakan terbukti merugikan keuangan negara senilai Rp 121 miliar dari proyek pengadaan alat simulator mengemudi kendaraan bermotor untuk ujian surat izin mengemudi (SIM) di Korlantas Polri tahun 2011. Selain pidana penjara, majelis hakim juga menghukum terdakwa membayar denda Rp 500 juta yang bisa diganti dengan kurungan selama enam bulan.” (<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1334-djoko-susilo-terbukti-korupsi-dan-cuci-uang>)

Selain kasus Irjen. Pol. Djoko Susilo, kasus lain yang mencoreng POLRI lainnya adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Badan Resor Kriminal (Kabareskrim) pada saat itu yaitu Komjen. Susno Duadji. Ada dua kasus yang membuat Susno menjadi terpidana, yakni kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari (SAL) dan kasus korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008. Susno dituduh telah menerima suap sebesar Rp500 juta dari Haposan Hutagalung selaku pengacara investor PT SAL, melalui Sjahril Djohan. (<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/410179-ini-akar-kasus-yang-mengirim-jenderal-susno-ke-bui>). Sangat ironis melihat fakta yang terjadi dalam lingkungan POLRI dewasa ini. POLRI yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat serta memberikan teladan untuk terciptanya masyarakat yang sadar hukum justru menjadi pelaku dari salah satu bentuk kriminal itu sendiri. Hal ini lah yang sewajarnya menjadi teguran serta koreksi terhadap POLRI untuk mengembalikan citranya di mata masyarakat.

Berkaca pada beberapa kasus yang menimpa POLRI diatas, penulis mencoba untuk mengangkat seorang tokoh dari kalangan POLRI yang dapat dijadikan teladan baik oleh anggota POLRI itu sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Tokoh yang akan coba dipaparkan oleh penulis disini adalah seorang tokoh perwira tinggi Polri yang kurang diketahui oleh khalayak ramai. Padahal tokoh ini memiliki peranan yang cukup penting pada masanya serta mengedepankan nilai-nilai kejujuran serta kesederhanaan yang saat ini sudah begitu sulit ditemukan. Khususnya di jajaran kepolisian Republik Indonesia. Hoengeng Iman Santoso, adalah tokoh yang akan penulis coba paparkan dalam karya tulis ilmiah ini.

Hoengeng Iman Santoso merupakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia ke-5. Hoengeng lahir di Pekalongan tanggal 14 Oktober 1921 tepatnya di kampung Pesatean, salah satu kawasan yang dulunya merupakan perkampungan Arab dan tak jauh dari kompleks pekuburan Cina (Yusra dan Ramadhan KH, 1994 hlm. 15). Hoengeng kecil dididik dalam keluarga yang menekankan kedisiplinan dalam segala hal. Ayahnya bernama Soekario Kario Hatmodjo. Seorang *ambtenaar* atau pegawai pemerintahan Hindia Belanda. Namun, Hoengeng kecil sama sekali tidak

menunjukkan kesombongan. Bahkan ia banyak bergaul dengan anak-anak dari lingkungan biasa (Santoso, 2009 hlm.6)

Hoegeng yang sudah mewarisi sikap kejujuran serta kesederhanaannya dari sang Ayah membawanya kepada karir yang begitu cemerlang baik di jajaran kepolisian maupun diberi amanah bertugas diluar lingkungan kepolisian. Selain menjadi seorang polisi, Hoegeng sempat diberikan amanah untuk bekerja diluar lingkungan kepolisian bahkan dilingkungan kementerian. Pada Januari 1961 Hoegeng dipercaya untuk menjadi Kepala Djawatan Imigrasi kemudian setelah 4 tahun menjadi Kepala Djawatan Imigrasi, Hoegeng diangkat menjadi Menteri Iuran Negara di tahun 1965.

Akhir dari karir Jenderal Pol Hoegeng adalah diberhentikan sebagai Kapolri pada tanggal 2 Oktober 1971. Padahal masih tersisa 2 tahun masa jabatannya. Kemudian, Hoegeng ditunjuk sebagai Duta Besar RI untuk Kerajaan Belgia. Namun, Hoegeng menolak dengan alasan lebih suka bekerja di Indonesia saja. Setelah diberhentikan menjadi Kapolri, Hoegeng menghabiskan hari-harinya dengan melukis dan bermain music. Hoegeng dan istrinya Mery mendirikan grup music *The Hawaiian Seniors* pada tahun 1975. Mereka sering tampil di layar TVRI dalam acara Gema Irama Lautan Teduh. Acara tersebut kemudian dilarang oleh pemerintah orde baru karena dianggap bukan musik asli Indonesia.

Tahun 1978 Hoegeng bergabung dalam Lembaga Kesadaran Berkonstitusi yang didirikan oleh Jenderal A.H. Nasution dan Mohammad Hatta. Kemudian pada tahun 1980 Hoegeng bergabung dalam kelompok Petisi 50 yang menandatangani “pernyataan Keprihatinan” terhadap pidato yang dibacakan oleh Presiden Soeharto di muka Rapim ABRI di Pekanbaru 27 Maret 1980 dan pada HUT Kopassandha di Cijantung 16 April 1980 (A.H.Nasution, 1997 hlm. 152). Dokumen tersebut ditandatangani oleh dua orang mantan perdana menteri pada masa awal kemerdekaan yaitu Mohammad Natsir dan Burhanuddin Harahap; Sjafruddin Prawiranegara; kemudian Jenderal Nasution, Letjend Ali Sadikin, Jenderal Hoegeng, Letjen Mokoginta dan Jenderal Jasin (Jenkins, 2010 hlm. 217). Ini sangat menarik, karena Hoegeng yang awal karirnya berada di kepolisian sebagai abdi negara yang begitu integritas dan loyal kepada pemerintah hingga

diangkat menjadi menteri kemudian menjadi oposisi ketika pemerintahan Orde Baru mulai menunjukkan kekuasaan yang tidak sewajarnya.

Di tengah terjadinya krisis kepercayaan kepada Polri dan birokrasi, Hoengeng tampil sebagai seorang yang pantas diteladani baik oleh kaum muda maupun taruna kepolisian. Presiden Abdurrahman Wahid pun pernah berkata bahwa terdapat tiga polisi yang tidak dapat disuap yakni polisi tidur, patung polisi dan Hoengeng. Sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, sudah sepatutnya anggota Polri memberikan teladan yang baik kepada masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, penulis merasa sangat tertarik untuk menulis seorang tokoh yang sangat memberi teladan pada masanya hingga saat ini. Jenderal Pol. Hoengeng yang mengawali kehidupannya sebagai seorang abdi negara yang loyal pada pemerintah sebagai anggota kepolisian, sampai akhirnya menjadi oposisi pemerintah karena keprihatinannya terhadap kondisi pemerintahan pada saat itu yang cenderung membelenggu kebebasan rakyat. Selain itu, judul yang sejenis dengan judul yang diangkat penulis di Departemen Pendidikan Sejarah sampai saat ini masih belum ada yang menulisnya, sehingga hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi suatu hal yang baru dan dapat memperkaya kajian mengenai tokoh nasional khususnya tokoh kepolisian di Departemen Pendidikan Sejarah UPI. Adapun penentuan periode tahun dari 1945 sampai tahun 1980 dengan alasan karir kepolisian Jenderal Pol. Hoengeng Iman Santoso dimulai pada tahun 1945 sebagai seorang agen polisi. Sampai pada tahun 1980 dimana Hoengeng bergabung dengan 49 warga negara Indonesia lainnya yang tergabung dalam Petisi 50.

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah Penelitian

Permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana kiprah Hoengeng Iman Santoso dari polisi sampai menjadi oposisi?”** . Untuk lebih memusatkan perhatian pada permasalahan di atas, rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perjalanan karir Hoegeng Iman Santoso?
2. Bagaimana peran Hoegeng Iman Santoso dalam memimpin Polri tahun 1968-1971?
3. Bagaimana prestasi Hoegeng Iman Santoso di kepolisian?
4. Bagaimana peran Hoegeng Iman Santoso dalam petisi 50 pada tahun 1980?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan perjalanan karir Hoegeng Iman Santoso dari kepolisian hingga menjadi menteri.
2. Mendeskripsikan peran Hoegeng Iman Santoso dalam memimpin Polri tahun 1968-1971.
3. Memaparkan apa saja prestasi Hoegeng Iman Santoso di kepolisian.
4. Memaparkan peran Hoegeng Iman Santoso dalam petisi 50 pada tahun 1980.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Menambah khazanah pengetahuan tentang Kepolisian Indonesia khususnya mengenai sejarah tokoh Kepolisian Republik Indonesia.
2. Memberikan pengetahuan mengenai peranan tokoh kepolisian Republik Indonesia yaitu Hoegeng Iman Santoso.
3. Memperkaya penelitian sejarah Nasional terutama mengenai peranan tokoh dalam masa peralihan pemerintahan Soekarno ke Soeharto.
4. Memperluas pengetahuan mengenai sejarah kondisi sosial-politik pada masa peralihan pemerintahan Soekarno ke pemerintahan Soeharto.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika penulisan merupakan gambaran menyeluruh mengenai penelitian yang dilakukan dari tahap awal sampai pada proses penulisan. Struktur organisasi skripsi yang akan dibuat dalam penelitian ini terdiri dari:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab Pendahuluan ini akan diuraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi skripsi. Dimana dalam pendahuluan ini akan diuraikan alasan penulis memilih topik yang akan diangkat dalam penelitian.

Bab II Kajian Pustaka. Dalam bab kajian pustaka akan diuraikan konsep maupun paparan tentang sumber literatur yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian. Seperti sejarah perkembangan kepolisian di Indonesia, kondisi sosial, ekonomi dan politik pada masa pemerintahan Presiden Suharto. Kemudian akan dikemukakan pula penelitian terdahulu yang terkait dengan penulisan skripsi. *HOEGENG IMAN SANTOSO: Dari Polisi Sampai Oposisi (1945-1980)* ini baik dari buku, jurnal maupun skripsi.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab III akan diuraikan metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode historis dengan menggunakan analisis biografi dari tokoh Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso. Metode historis ini terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Tahapan ini meliputi pemilihan topik yang sesuai, mengusut semua evidensi (bukti) yang relevan dengan topik, membuat catatan tentang apa saja yang dianggap penting dan relevan dengan topik yang ditemukan ketika penelitian sedang berlangsung, mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan, menyusun hasil-hasil penelitian ke dalam sistematika tertentu yang sudah disiapkan sebelumnya, dan menyajikan dalam suatu cara yang dapat mengkomunikasikannya kepada pembaca sehingga dapat dimengerti dengan jelas.

Bab IV Temuan dan Pembahasan. Pada bab ini penulis akan menguraikan berbagai temuan penulis dari hasil kajian literatur. Kemudian akan dikemukakan pula jawaban-jawaban atas rumusan masalah serta pertanyaan penelitian yang sebelumnya telah dikemukakan dalam bab pendahuluan mengenai penelitian tentang *HOEGENG IMAN SANTOSO: Dari Polisi Sampai Oposisi (1945-1980)*.

Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi. Pada bab ini penulis akan memamparkan kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan yaitu tentang *HOEGENG IMAN SANTOSO: Dari Polisi Sampai Oposisi (1945-1980)*. Selain itu penulis akan memberikan rekomendasi yang akan berguna bagi peneliti selanjutnya jika akan membahas topik yang sama.